

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang berada di Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi Banten dulunya merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat, namun resmi memisahkan diri untuk menerapkan otonomi daerah dan desentralisasi. Pada masa awal-awal pemerintahan Provinsi Banten mengalami keterlambatan pembangunan. Namun saat ini, Provinsi Banten mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam perekonomian, mengingat wilayah Provinsi Banten merupakan salah satu jalur penghubung pulau besar di Indonesia, yaitu Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

Kegiatan ekonomi Indonesia sangat berpengaruh kepada kedua pulau ini, Pulau Sumatera sebagai daerah penghasil barang mentah dan daerah distribusi barang olahan, sedangkan Pulau Jawa sebagai daerah industri penghasil barang olahan serta menjadi daerah distribusi bahan mentah. Pengaruh kedua pulau ini sangat menguntungkan, terutama terhadap sektor industri, jasa pariwisata dan transportasi lintas ASEAN. Dalam ekonomi dunia pun posisi Sumatera dan Jawa berperan sangat penting dalam konteks regional.

Provinsi Banten tidak terlepas dari masalah ketenagakerjaan, dimana tidak seimbangya permintaan dan penawaran tenaga kerja. Hal tersebut terlihat dari tingginya jumlah angkatan kerja. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa jumlah angkatan kerja di Banten pada tahun 2018 mencapai 5,8 juta jiwa jumlah tersebut meningkat sebesar 4,15% atau setara dengan 232 ribu jiwa dibandingkan

dengan tahun 2017 (Tabel 1.1). Terjadinya peningkatan jumlah angkatan kerja menyebabkan tingginya penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Namun tingginya penawaran tenaga kerja tidak diimbangi dengan permintaan tenaga kerja. Hal tersebut menyebabkan tingginya jumlah pengangguran sebesar 496 ribu jiwa (8,52%).

Tabel 1.1 Data Ketenagakerjaan Provinsi Banten Tahun 2014-2018 (Jiwa)

Kabupaten/Kota	Angkatan Kerja				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pandeglang	468.502	491.031	474.366	501.045	522.323
Lebak	614.548	560.384	538.579	581.370	607.241
Tangerang	1.467.353	1.513.501	1.543.983	1.651.753	1.696.648
Serang	622.428	620.527	640.635	628.101	659.042
Kota Tangerang	1.001.174	992.091	998.716	1.046.999	1.049.823
Kota Cilegon	185.307	186.664	197.686	185.832	198.809
Kota Serang	273.412	284.893	253.113	293.196	299.760
Kota Tangsel	705.321	685.752	637.347	708.667	795.582
Banten	5.338.045	5.334.843	4.890.155	5.596.963	5.829.228

Sumber: Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Banten, data diolah

Meningkatnya jumlah angkatan kerja tiap tahunnya di Provinsi Banten tidak menjamin keberhasilan suatu pembangunan bahkan dapat menjadi beban bagi keberhasilan pembangunan, karena jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja yang malah akan membuat penduduk angkatan kerja tersebut tidak memperoleh pekerjaan. Permasalahan tersebut sudah dipastikan akan membuat permasalahan dibidang ketenagakerjaan.

Dari kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih rendahnya sektor formal yang belum dapat disediakan oleh negara. Oleh sebab itu, perlu adanya langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan perekonomian agar pembangunan dapat merata segera terwujud. Sehingga, diperlukan pengelolaan dan pemberdayaan sektor-sektor andalan yang efektif guna menyerap tenaga kerja lebih banyak.

Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah atau banyaknya orang yang bekerja di berbagai sektor. Jumlah tenaga kerja akan terus berubah seiring dengan berlangsungnya demografi. Proporsi tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat sektor ekonomi dalam menyerap tenaga kerja. Hal tersebut mencerminkan struktur perekonomian suatu wilayah.

Kondisi pendidikan Indonesia sering menjadi sorotan publik, terutama Banten. Beberapa hal yang terjadi, seperti pendidikan yang belum merata, rendahnya infrastruktur dan kualitas tenaga pengajar yang masih rendah. Menurut Kepala Bappeda Banten, masalah pendidikan akan menjadi penyumbang lambatnya pembangunan di suatu daerah. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memfokuskan pendidikan untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Berbagai langkah perbaikan baik fisik maupun non fisik, seperti sumber daya manusia yang terus ditingkatkan, perbaikan fisik seperti perbaikan gedung sekolah hingga penambahan ruang kelas baru.

Tabel 1.2 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah				
	2014	2015	2016	2017	2018
Kabupaten Tangerang	8,20	8,22	8,23	8,24	8,27
Kabupaten Serang	6,69	6,90	6,98	7,17	7,18
Kota Tangerang	10,20	10,20	10,28	10,29	10,51
Kota Cilegon	9,66	9,67	9,68	9,69	9,73
Provinsi Banten	8,19	8,27	8,37	8,53	8,62

Sumber: Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

Dari tabel 1.2 dijelaskan bahwa rata-rata lama sekolah pelajar di kabupaten/kota Provinsi Banten terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut mengartikan bahwa masih adanya kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Walaupun, Kabupaten Serang masih berada di bawah rata-rata lama sekolah Provinsi Banten.

Menurut Debi Ruli Sandi (2013), dalam penelitiannya pendidikan sangat penting bagi semua orang. Pentingnya peran pendidik dalam meningkatkan mutu pendidikan dan faktor utama yang mejamin sekolah lebih baik adalah apabila sekolah tersebut memiliki pendidik yang baik. Oleh sebab itu, diperlukan penghargaan bagi tenaga pendidik yang memiliki prestasi dan dedikasi, agar terus dapat mencetak sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif lainnya.

Penerapan upah minimum merupakan usaha dalam rangka meningkatkan upah perkapita pekerja sehingga tingkat upah rata-rata tenaga kerja dapat meningkat. Namun terdapat perbedaan pendapat antara pengusaha dan pekerja. Hal itu terlihat saat serikat pekerja menginginkan upah minimum yang signifikan, sedangkan pengusaha melihat bahwa tuntutan tersebut berbeda dengan upaya pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Tabel 1.3 Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Banten (dalam rupiah)

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
Kabupaten Pandeglang	1.418.000	1.737.000	1.999.981	2.164.979	2.353.548
Kabupaten Lebak	1.490.000	1.728.000	1.965.000	2.127.112	2.312.384
Kabupaten Tangerang	2.442.000	2.710.000	3.021.650	3.270.936	3.555.835
Kabupaten Serang	2.340.000	2.700.000	3.010.500	3.258.866	3.542.714
Kota Tangerang	2.444.301	2.730.000	3.043.950	3.295.075	3.582.077
Kota Cilegon	2.443.000	2.760.590	3.078.058	3.331.997	3.622.215
Kota Serang	2.166.000	2.375.000	2.648.125	2.866.595	3.116.276
Kota Tangerang Selatan	2.442.000	2.710.000	3.021.650	3.270.936	3.555.835
Banten	1.325.000	1.600.000	1.784.000	1.931.180	2.099.385

Sumber: Banten dalam angka, data diolah

Dari tabel 1.3 dijelaskan bahwa upah minimum Banten dalam kurun waktu 2014 hingga 2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan meningkatnya upah minimum dapat membuat daya beli masyarakat meningkat, hal tersebut juga akan mempengaruhi meningkatnya jumlah angkatan kerja dan berimbas pada meningkatnya permintaan barang dan jasa sehingga akan berimbas juga pada peningkatan pasar tenaga kerja, karena membutuhkan tambahan output atau sebaliknya. Peningkatan upah minimum juga menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat, karena para pekerja menjadi terdorong untuk memnuhi kebutuhan keluarga agar memiliki kehidupan yang layak.

Investasi sangat berpengaruh terhadap kemajuan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Investasi dipengaruhi oleh investasi asing dan domestik. Investasi yang terjadi di daerah terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi dari sektor swasta dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (asing).

Berdasarkan tabel 1.4 dijelaskan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDA) pada tahun 2014 hingga 2018 terus meningkat. Pada tahun 2018, PMDN Banten sebesar Rp 18.088,4 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar

Rp 15.141,9 miliar, yang artinya terdapat pertumbuhan sebesar 19,5 persen. Kemudian, untuk perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar US\$ 220,2 juta dibandingkan tahun 2017 bernilai US\$ 3.047,50 juta.

Tabel 1.4 Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Banten

Tahun	PMDN		PMA	
	Proyek	Realisasi (Miliar Rupiah)	Proyek	Realisasi (Juta US\$)
2018	715	18.088,4	1895	2.827,3
2017	715	15.141,9	2479	3.047,50
2016	493	12.426,3	2161	2.912,10
2015	363	10.209,9	1737	2.542,00
2014	99	8.081,3	709	2.034,60

Sumber: Banten Dalam Angka, data diolah.

Investasi terus didorong dengan kondusivitas kebijakan perekonomian. Upaya ini salah satunya bertujuan agar pelaku usaha yang sudah ada di Indonesia lebih aktif melakukan ekspansi dan dapat menarik banyak investor baru. Guna menjaga keberlangsungan investasi. Langkah pemerintah yang telah dijalankan antara lain memberikan kemudahan perizinan usaha, menjaga ketersediaan bahan baku, serta menyiapkan sumber daya manusia yang terampil melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Dengan kemudahan untuk berinvestasi itu bisa menjadi *multiplier effect* terhadap aktivitas perekonomian, terutama terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut mendorong terciptanya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dilakukan penelitian dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Banten**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Untuk mencari solusi yang tepat dari permasalahan tersebut, maka perumusan masalah yang akan diteliti:

1. Bagaimana pengaruh pendidikan, upah minimum dan investasi secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten ?
2. Bagaimana pengaruh pendidikan, upah minimum dan investasi secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendidikan, upah minimum dan investasi secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten ?
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendidikan, upah minimum dan investasi secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten ?

1.4. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan yang hendak dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Membantu penulis dalam menganalisis penelitian pengaruh, pendidikan, upah minimum dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja.

